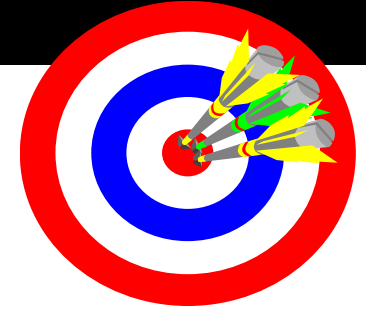


Dari Visi ke Aksi

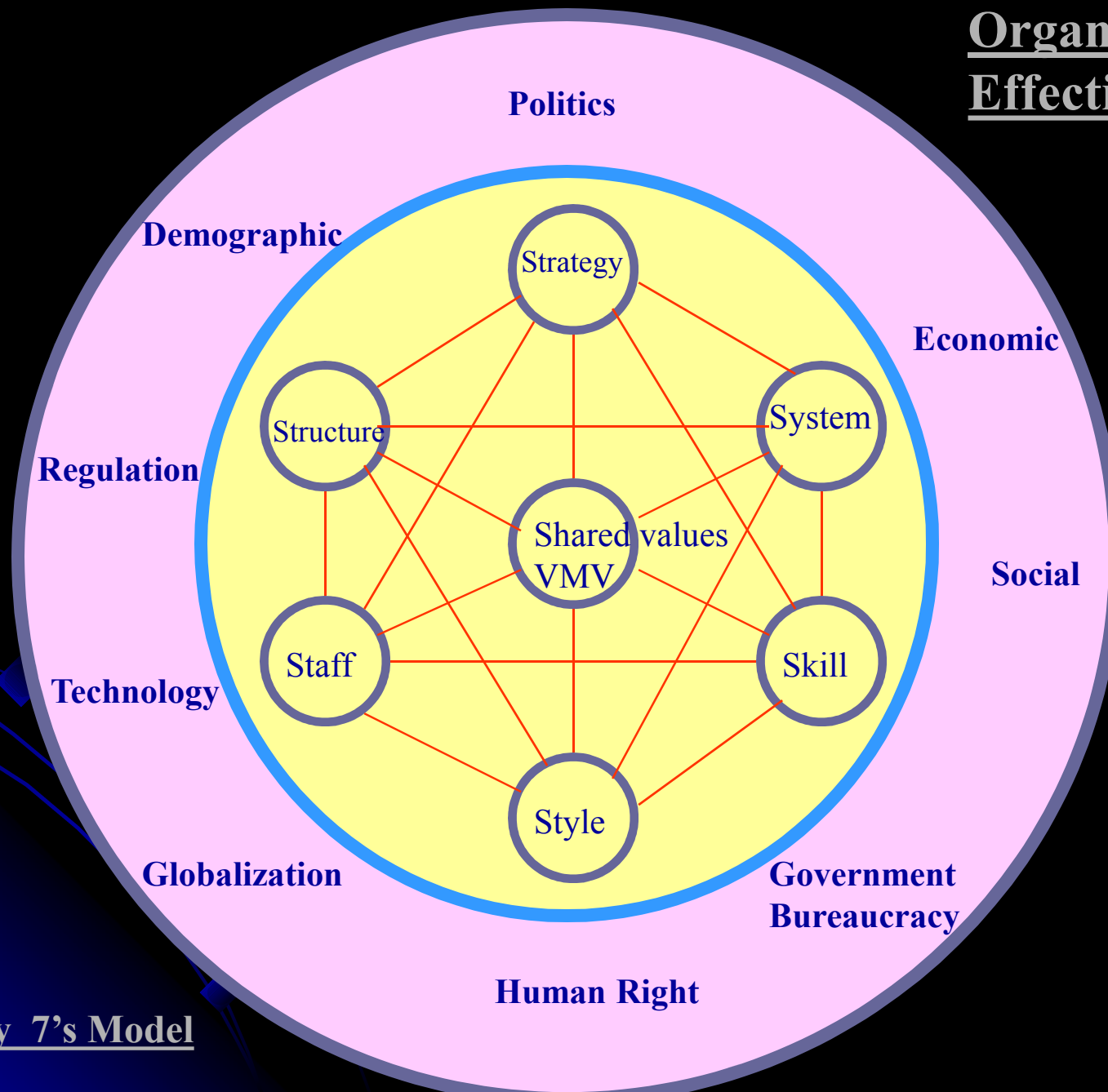


**Penerjemahan Visi dan Misi ke dalam
Kegiatan Birokrasi Pemerintah
Dan Organisasi Pembelajaran**

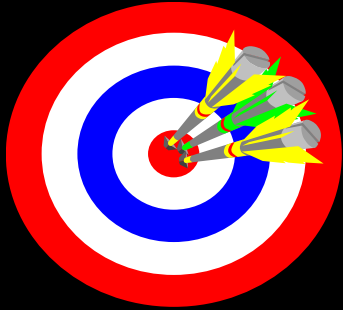
Oleh:

Prof. Djamaludin Ancok, Ph.D

Organizational Effectiveness



McKinsey 7's Model



Apakah Visi itu

Visi adalah harapan tentang masa depan Birokrasi yang realistik, bisa dicapai dan menarik.

Visi adalah jabaran tujuan ke mana Birokrasi harus menuju, masa depan yang lebih baik dan lebih sukses.

Dare To Dream



KEGUNAAN VISI

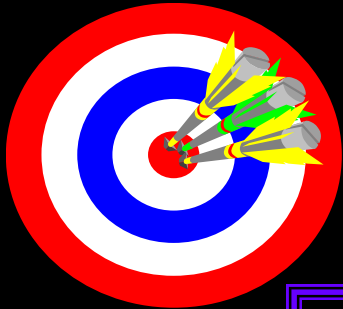
**Visi yang benar menarik dan menumbuhkan komitmen pejabat
birokrasi pemerintahan**

**Visi yang benar menumbuhkan kebermaknaan dalam hidup pejabat
birokrasi pemerintahan**

**Visi yang benar memotivasi pejabat birokrasi pemerintahan untuk
bekerja dengan kualitas prima.**

**Visi yang benar akan menjadi jembatan bagi masa depan Birokrasi
yang lebih efisien, efektif dengan layanan prima.**

Ciri Statemen Visi yang Efektif



Terfokus dan jelas

Jelas dan mudah dibayangkan perwujudannya dalam kenyataan.

Mengandung sesuatu hal yang sangat mulia

Birokrasi yang menyumbangkan sesuatu bagi kepentingan orang banyak.

Peluang sukses untuk mencapainya cukup besar

Something that is possible and realistic.

Ciri Visi Birokrasi Yang Efektif

- Cocok untuk organisasi birokrasi dalam memajukan kehidupan bangsa.
- Menumbuhkan standard keprimaan.
- Membuat tujuan Pemerintahan mudah dicapai.
- Menumbuhkan antusiasme dan komitmen pejabat dalam bekerja.
- Statemen yang jelas, mudah dimengerti dan diingat.
- Memberikan nuansa keunikannya, kompetensinya, dan idealismenya.
- Menumbuhkan ambisi bagi Pejabat Birokrasi pemerintahan untuk mencapainya.

Penelaahan Visi

- **Apakah Birokrasi pemerintahan memiliki visi yang dirumuskan dalam bentuk tertulis.**
- **Bila Birokrasi menerapkan visi yang ada, bagaimanakah kondisi pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa sepuluh tahun ke depan?
Apakah arah itu baik bagi Birokrasi Pemerintah?**
- **Apakah semua pejabat dari eselon tertinggi sampai paling rendah memahami kemana arah kegiatan birokrasi? dan apakah mereka setuju dengan arah tersebut?**
- **Apakah komponen organisasi Birokrasi Pemerintahan: Struktur , Strategi, sistim , staff, skill, dan style yang sekarang ada cocok dengan visi Birokrasi?**

Pertanyaan yang diajukan dalam menyusun Visi

- **Reputasi apa yang ingin dimiliki Birokrasi Pemerintah ?**
- **Layanan Prima apa yang diberikan oleh Birokrasi Pemerintah?**
- **Nilai kerja dan budaya kerja seperti apa yang dimiliki Birokrasi Pemerintah?**
- **Siapa yang akan menjadi customer dan mitra kerja?**
- **Bagaimana penampilan fisik kantor, dan fasilitas kerja dll?**

Kondisi Memerlukan Perubahan Visi

- **Ketidakjelasan kemana organisasi birokrasi harus menuju.**
- **Anggota organisasi kehilangan kegairahan kerja karena kurang menantang dan kehilangan kegembiraan dalam bekerja**
- **Kehilangan legitimasi karena menurunnya rating pelayanan, inovasi menurun, dan fakta integritas.**
- **Berubahnya lingkungan strategik, cara lama tidak cocok lagi**
- **Hilangnya kebanggaan karyawan/pejabat dan loyalitas pada organisasi**
- **Pejabat takut mengambil resiko.**
- **Karyawan/pejabat Merasa tidak ada kemajuan dan bahkan mulai mundur.**
- **Masyarakat/ pegawai mulai tidak percaya pada pimpinan.**

AUDIT VISI

Level Penerimaan terhadap Visi

1. **Telling**, Pegawai menerima karena diperintah pimpinan.
2. **Selling**, Pegawai menerima karena pimpinan mensosialisasikannya.
3. **Testing**, Pegawai menerima karena diminta pandangan apakah dia setuju pada visi.
4. **Consulting**, Pegawai menerima karena dia diminta masukannya untuk menyempurnakan visi.
5. **CO-creating**, Pegaawai menerima karena dia dilibatkan sejak awal di dalam menyusun visi tersebut.

Level Consulting dan Co-creating adalah level yang dapat membuat pegawai mau mengadopsi visi sebagai visi dirinya sendiri.

KOMPONEN STATEMEN VISI BIROKRASI

**INGIN MENJADI BIROKRASI
SEPERTI APA?**

a) utama; unggul; panutan; kelas dunia; berkembang

YANG MENGHASILKAN / MENYEDIAKAN

b) pelayanan prima

UNTUK

d) masyarakat Kota Palangkaraya Kal-Teng,
Bangsa Indonesia, dan dunia internasional.

MISI

Misi adalah pernyataan untuk apa Birokrasi dibangun

Misi adalah batasan tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh Pemda.

Contoh misi:

“ Misi Pemda Kota adalah menyediakan pelayanan publik yang prima dengan biaya serendah mungkin, dan memberikan kemudahan dan kepuasan kepada karyawan dan masyarakat.

s

Goal

Goal adalah hal yang ingin dicapai oleh Pemda dalam kegiatan sehari-hari untuk jangka waktu yang relatif panjang

Goal disusun berdasarkan kriteria berikut:

- 1. Goal diturunkan dari visi dan misi Pemda**
- 2. Sesuatu yang penting bagi karyawan , masyarakat, dan negara**
- 3. Memiliki skala prioritas tinggi**
- 4. Jumlahnya tidak terlalu banyak supaya terfokus**
- 5. Dapat disusun strategi untuk mencapainya.**

Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai goal jangka panjang Pemda.

Kegiatan (Tactics)

Kegiatan adalah aktivitas Pemda yang bersifat jangka pendek dan terukur yang berupa proyek (aktivitas) yang harus dilakukan untuk pencapaian goal.

Kegiatan yang baik memiliki ciri:

1. Memiliki Penanggung Jawab agar pelaksanaannya dapat dilakukan.
2. Memiliki jadwal pelaksanaan dan evaluasi
3. Bisa diukur hasilnya secara SMART.

Specific
Measurable
Attainable
Reasonable
Timely

Visi/Misi

```
graph TD; VM[Visi/Misi] --> G1(goal 1); VM --> G2(goal-2); VM --> G3(goal-3); VM --> G4(goal-4); G1 --> S1(strategi-1); G2 --> S2(strategi-2); G3 --> S3(strategi-3); G4 --> S4(strategi-4); S1 --> K1[Kegiatan/  
Penanggung jawab.]; S2 --> K2[Kegiatan/  
Penanggung jawab.]; S3 --> K3[Kegiatan/  
Penanggung jawab.]; S4 --> K4[Kegiatan/  
Penanggung jawab.];
```

goal 1

goal-2

goal-3

goal-4

strategi-1

strategi-2

strategi-3

strategi-4

Kegiatan/
Penanggung
jawab.

Kegiatan/
Penanggung
jawab.

Kegiatan/
Penanggung
jawab.

Kegiatan/
Penanggung
jawab.



VISI

**Babel Sejahtera,
Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi
Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yang Efisien dan Cepat
Berbasis Teknologi**



6 MISI

1

• **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH**

2

• **MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH YANG BERKUALITAS**

3

• **MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN HANDAL**

4

• **MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT**

5

• **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI**

6

• **MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**



13 UNGGULAN PEMBANGUNAN

- 1 • PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN
- 2 • PEMBANGUNAN BAHARI
- 3 • PEMBANGUNAN PARIWISATA
- 4 • PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN
- 5 • **PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH**
- 6 • PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
- 7 • PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR
- 8 • PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
- 9 • PEMBANGUNAN KESEHATAN
- 10 • PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK
- 11 • PEMBAGUNAAN BERDEMOKRASI
- 12 • **PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN**
- 13 • **PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**



9 TUJUAN RPJMD

1

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

2

- Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat

3

- Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah

4

- Meningkatnya pendidikan masyarakat

5

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

6

- Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas

7

- Meningkatnya Pembangunan Demokrasi

8

- Meningkatnya tata kelola kebencanaan

9

- Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup



21 SASARAN RPJMD

1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian
2. Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan
3. Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata
4. Meningkatnya Produksi sektor pertambangan
5. Meningkatnya pembangunan berbasis industri
6. Terwujudnya kemandirian energi
7. Meningkatnya belanja pemerintah Daerah
8. Menurunnya angka Pengangguran
9. Menurunnya angka kemiskinan
10. Menurunnya angka Inflasi
11. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
12. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah
13. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
14. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat
15. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat
16. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
17. Birokrasi yang efektif dan efisien
18. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas
19. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
20. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana
21. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup



25 ISU STRATEGIS (1)

Isu Ekonomi

1.	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
2.	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
3.	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
4.	Kemandirian Pangan Rendah
5.	Tingginya tingkat inflasi
6.	Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
7.	Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
8.	Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
9.	Tingkat Investasi Rendah
10.	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

Isu Infrastruktur dan Konektivitas

11.	Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
12.	Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
13.	Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
14.	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
15.	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
16.	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika



25 ISU STRATEGIS (2)

Isu Sumber Daya Manusia

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 17. | Tingkat pendidikan SDM masih rendah |
|-----|-------------------------------------|

Isu Kesehatan

- | | |
|-----|---|
| 18. | Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas |
| 19. | Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah |
| 20. | Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat |

Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi

- | | |
|-----|--|
| 21. | Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal |
| 22. | Kondusivitas demokrasi belum stabil |

Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

- | | |
|-----|--|
| 23. | Lingkungan hidup banyak yang rusak |
| 24. | Rawan bencana |
| 25. | Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten |



46 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....1

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	Program Penyusunan kebijakan Perlindungan lahan pertanian untuk berkelanjutan
2	Program Peningkatkan produksi pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
3	Program Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan
4	Program Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
5	Program Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
6	Program Pengembangan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan
7	Program pengembangan pembangunan pariwisata
8	Program Pengembangan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
9	Program Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
10	Program Peningkatan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah hasil tambang yang berwawasan lingkungan
11	Program Pengembangan Kawasan industri berbasis potensi daerah
12	Program Pengembangan Kemandiriaan Energi
13	Program Peningkatan Pendapataan Asli Daerah
14	Program Penciptaan Peluang lapangan pekerjaan dan usaha
15	Program Penanggulangan Kemiskinaan dan PMKS



46 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....2

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
16	Program peningkatkan pengendalian Inflasi Dearah
17	Program Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
18	Program Pemenuhan infrastruktur pertanian
19	Program Pemenuhan infrastruktur air baku
20	Program pengembangan konektivitas perhubungan laut
21	Program pengembangan konektivitas perhubungan darat
22	Program Pembangunan jalan dan jembatan
23	Program Peningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
24	Program Peningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
25	Program Peningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
26	Program Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
27	Program Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
28	Program Pengendalian Penyalahgunaan Napza
29	Program Peningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
30	Program Peningkatan tata kelola pengawasan
31	Program Peningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
32	Program peningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
33	Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa



46 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....3

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
34	Program Peningkatan pencapaian reformasi birokrasi
35	Program peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
36	Program Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi
37	Program Peningkatkan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien berbasis teknologi
38	Program Peningkatan kebebasan sipil Masyarakat
39	Program Peningkatan partisipasi politik masyarakat
40	Program pengembangan lembaga demokrasi
41	Program peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana
42	Program pengembangan kawasan berbasis penanggulangan bencana
43	Program Peningkatkan kualitas air
44	Program Peningkatan kualitas Udara
45	Program peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
46	Program pengendalian terhadap lingkungan Hidup



104 ARAH KEBIJAKAN....1

ARAH KEBIJAKAN

1	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
2	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan
3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
4	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
6	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian
8	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
9	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
10	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
11	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian
12	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
13	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
14	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
15	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan



104 ARAH KEBIJAKAN.... 2

ARAH KEBIJAKAN

16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
17	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
18	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
19	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
20	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
21	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar
22	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
23	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
24	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
25	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
26	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
27	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
28	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
29	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
30	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang



104 ARAH KEBIJAKAN....3

ARAH KEBIJAKAN

31	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
32	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
33	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
34	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba
35	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
36	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
37	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
38	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil
39	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
40	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral
41	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
42	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral
43	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
44	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
45	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
46	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
47	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
48	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu



104 ARAH KEBIJAKAN....4

ARAH KEBIJAKAN

49	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
50	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
51	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
52	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
53	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
54	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
55	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
56	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
57	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
58	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
59	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
60	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
61	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
62	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
63	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
64	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
65	peningkatan akses pelayanan pendidikan
66	peningkatan mutu layanan pendidikan.
67	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
68	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral



104 ARAH KEBIJAKAN....5

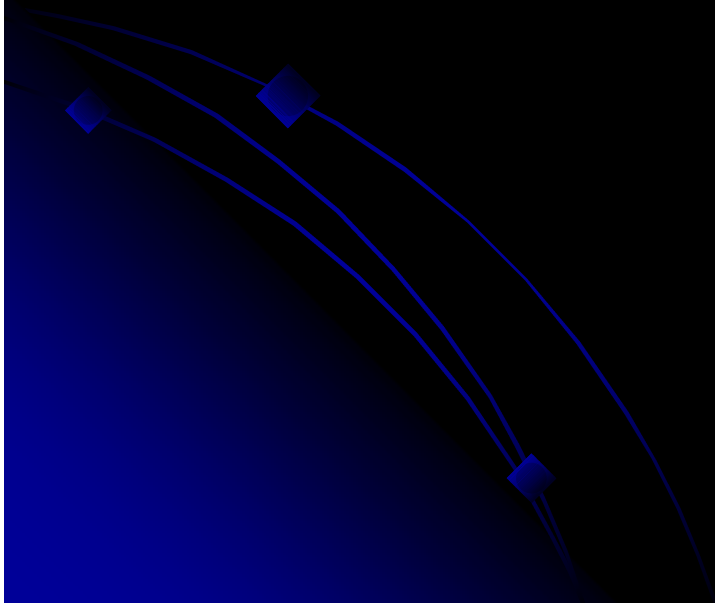
ARAH KEBIJAKAN	
69	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
70	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
71	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
72	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
73	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
74	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
75	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
76	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
77	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
78	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
79	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
80	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
81	Peningkatan integritas, kompetensi dan profesional aparatur
82	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
83	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
84	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
85	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,



104 ARAH KEBIJAKAN....6

ARAH KEBIJAKAN	
86	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
87	Menghilangkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
88	Menjamin hak anak dalam pembangunan
89	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
90	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
91	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
92	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
93	Peningkatan penyelenggaraan pra penanggulangan bencana
94	Peningkatan Tanggap darurat terhadap kejadian bencana
95	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
96	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
97	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur
98	Pengendalian kualitas air
99	pengendalian kualitas udara
100	Peningkatan tutupan lahan
101	Pengembangan Perhutanan Sosial
102	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
103	Pengembangan kawasan TPA Regional
104	Peningkatan Penataan Kawasan Kumuh

Organisasi Pembelajaran



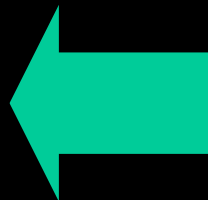
Mengapa Organisasi Harus Belajar

- Sama halnya dengan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, organisasi birokrasi itu sama seperti makhluk hidup. Dia harus beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan agar bisa terus hidup. Oleh karena itu organisasi birokrasi harus terus belajar agar dia mampu beradaptasi pada perubahan dan tuntutan lingkungan dalam berbagai dimensinya.
- Kemampuan organisasi di dalam menumbuhkan keunggulan dirinya, yang salah satu faktornya adalah inovasi, sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi. Untuk belajar dan beradaptasi maka organisasi harus mampu menumbuhkan pengetahuan baru melalui kerjasama antar individu dan antar unit di dalam organisasi.

Ciri Birokrasi dan Modal Manusia Organisasi Yang Terus Belajar

Birokrasi

Konsep
Kompetensi
Koneksi
Kredibilitas
Kepedulian



Human Capital

Modal Intelektual
Modal Emosional
Modal Ketabahan
Modal Sosial
Modal Etika
Modal Kesehatan

Modal Manusia (1)

Modal Intelektual

Pengetahuan yang dimiliki, keluasan wawasan, kreatifitas, kemauan belajar, serta potensi IQ yang tinggi).

Inovasi berbagai produk baru, inovasi pelayanan, dan inovasi proses bisnis yang akhirnya meningkatkan mutu produk, mutu pelayanan (Quality) ,

pengurangan waktu dalam proses produksi dari rancangan sampai ke produk jadi (time), dan pengurangan harga produk (price).



Modal Manusia (2)

Modal Emosional

- (Kestabilan emosi, empati pada orang lain, kemampuan memahami
- Oranglain, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
- Mau berbagi pengetahuan)



angry

Modal Manusia (3)



Modal Ketabahan

(Ketabahan dalam menghadapi kesulitan, daya juang untuk terus maju)

Modal Manusia (4)

- **Modal Sosial**

(Kemampuan membangun network dan bekerjasama dengan orang lain, membangun silaturahmi, dan berbagai wawasan dan saling belajar. Network ke dalam dan keluar perusahaan dengan mitra bisnis, pelanggan dan pemerintah). Modal sosial akan memungkinkan perusahaan menengetahui selera pelanggan baik dari jenis dan mutu produk, mutu pelayanan, dan harga perusahaan.



Dance

Modal Manusia (5)

Modal Etika

Bekerja
berdasarkan etika
profesi dan etika
bisnis dengan
Semangat untuk
berbuat untuk
banyak orang



NICK

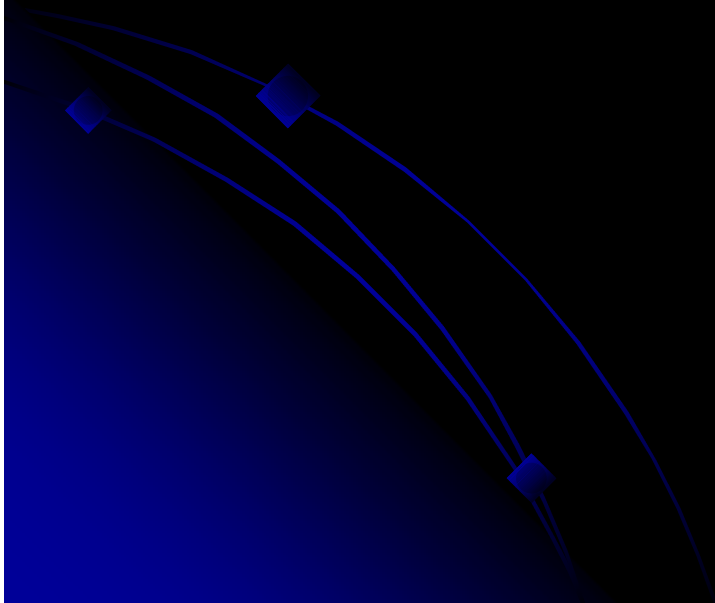
Modal Manusia (6)

- **Modal kesehatan**

Sehat, tidak sakit, tidak mudah loyo, kekuatan fisik yang tinggi, fungsi otak berjalan baik untuk belajar dan menambah pengetahuan.



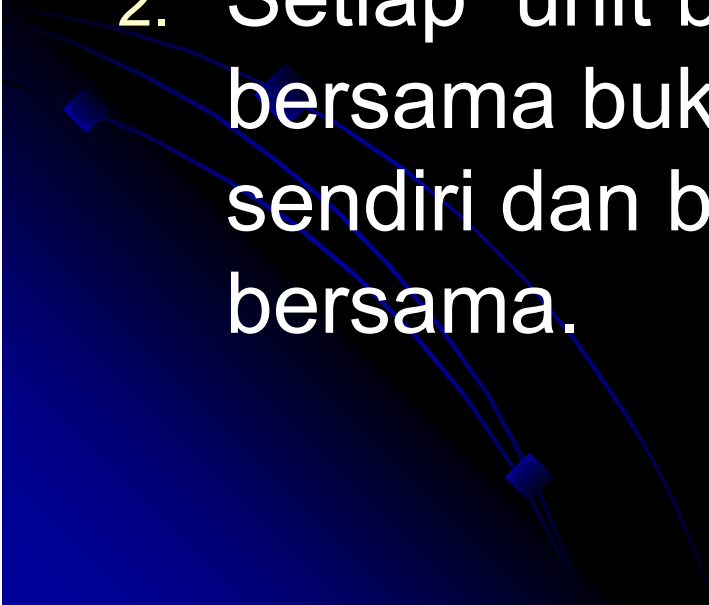
Organisasi Tidak Cerdas
Karena tidak mau
bersinergi dan belajar
bersama



Lima Komponen Organisasi Belajar

- Visi Bersama seluruh unit.
- Model Mental (Cara pandang terhadap masalah)
- Berfikir dalam sebuah sistim .
- Belajar antar Tim
- Belajar terus menerus secara pribadi.

Visi Bersama (*Shared Vision*).

1. Visi bersama tentang arah dari sebuah organisasi Birokrasi adalah hal utama yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi pembelajar.
 2. Setiap unit berfikir tentang kepentingan bersama bukan hanya kepentingan sendiri dan berpegang teguh pada visi bersama.
- 

Model Mental (Cara pandang)

2. *Model Mental*. Adanya cara pandang dalam melihat pengelolaan Birokrasi dan semua warga Birokrasi.

Unit lain adalah bagian dari sukses bersama. Tanpa melihat keterkaitan yang saling membantu dengan unit lain organisasi tidak bisa berfungsi maksimal.

Berfikir sistemik

3. *Berfikir sistemik*

Komponen ini berupa pemikiran dan pemahaman bahwa organisasi itu adalah sebuah sistem yang tiap-tiap bagiannya (komponennya) saling terkait satu sama lain.

Cara berfikir sektoral, hanya meekikirkan kepentingan unit tidak melihat kepentingan bersama akan hilang kalau kita berfikir sistemik.

Belajar bersama

4. *Team learning* (belajar dalam kelompok atau lintas kelompok). Belajar yang paling cepat adalah belajar dalam kelompok yang ditandai oleh adanya perilaku berbagi pengetahuan.

Kalau semua unit belajar bersama tidak terbatas pada unit sendiri, maka organisasi akan cerdas dan banyak inovasi.

Pengembangan Diri

5. *Personal Mastery* (pengembangan kompetensi diri). Ciri yang lainnya dari organisasi pembelajar adalah kemauan setiap warga birokrasi untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya dengan senantiasa belajar.

Belajar terus menerus ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang bisa membahayakan birokrasi.

Terima Kasih

